




Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda


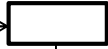
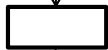
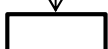
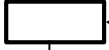
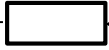

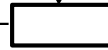
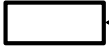
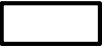




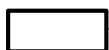
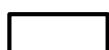
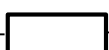
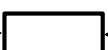
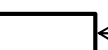



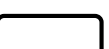
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
SOP Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
"Peninjauan Lapangan"

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda,  Ir. Endang Liansyah, MP. Pembina Utama Muda/ IVc NIP. 19650825 199203 1 004

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.	<ol style="list-style-type: none">1. ASN dan Non ASN2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.3. Memiliki kompetensi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.4. Mampu melakukan analisa dan evaluasi kesesuaian upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dengan dokumen lingkungan yang dimiliki.5. Cakap dan mampu melaksanakan kegiatan lapangan dalam rangka pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.6. Cakap dan mampu mengoperasikan alat pengujian kualitas air.7. Cakap dan mampu mengoperasikan perangkat komputer8. Mampu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan pelaku kegiatan/usaha dan Masyarakat.

Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan penunjang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat 2. Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Samarinda 3. Bidang Penaatan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Personal Computer (computer/ laptop/ notebook) 3. Kamera/<i>smartphone</i> 4. GPS 5. Alat uji kualitas air insitu/ water quality checker (minimal pH meter/ pH paper) 6. Alat Pelindung Diri (APD)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilakukan peninjauan lapangan dalam rangka kesesuaian dokumen maka tidak didapatkan data kinerja suatu kegiatan usaha terhadap ketentuan yang berlaku, nantinya data tersebut akan digunakan sebagai upaya tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap dampak yang terjadi. 2. Kegiatan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara kontinyu sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku agenda surat masuk 2. Buku register hasil pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

SOP PENINJAUAN LAPANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kadis	Sekretaris	Kabid PPKLH	Koordinator Pembinaan	Tim Pembinaan	Kegiatan Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan usaha							Daftar kegiatan usaha yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan atau Persetujuan Teknis	2 hari	Hasil Inventarisasi dan Identifikasi
2.	Rekapitulasi Kegiatan Usaha Fokus Pembinaan							Hasil Inventarisasi dan Identifikasi	1 hari	Rekapitulasi kegiatan usaha yang akan dibina
3.	Jadwal Pelaksanaan Pembinaan							Rekapitulasi kegiatan usaha yang akan dibina	30 menit	Jadwal Pelaksanaan kegiatan
4.	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pembinaan							Jadwal Pelaksanaan kegiatan	30 menit	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan
5.	Pelaksanaan Pembinaan dan Berita Acara Pembinaan							Surat tugas, dokumen persetujuan lingkungan dan atau persetujuan teknis serta peralatan penunjang	1 hari	Berita Acara
6.	Progress Perbaikan Hasil Berita Acara							Surat progress perbaikan	10 hari	Hasil Progress Perbaikan
7.	Laporan Hasil Pembinaan							Berita acara, hasil progress perbaikan	1 hari	Laporan
8.	Rekapitulasi Kegiatan Usaha yang telah dibina							Berita Acara, Hasil Progress Perbaikan, Laporan	1 hari	Rekap Kegiatan Usaha
9.	Pengarsipan							Surat Tugas, Surat Pemberitahuan, Berita Acara, Laporan, Rekap Kegiatan Usaha	30 menit	Dokumen Pembinaan